

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini berisi dialog antara temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab empat (4) dengan teori pada bab dua (2). Temuan penelitian berkaitan dengan upaya sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di SDI Al Azhaar dan di SD Noble *National Academy* yang akan dikaji dengan memperhatikan teori atau konsep terkait. Posisi teori dan konsep terhadap temuan adalah sebagai penguat, pembanding, dan resisten terhadap teori yang ada. Dalam pembahasan ini, akan dilakukan pembahasan secara mendalam terkait dengan; 1) desain kurikulum berbasis inklusi, 2) implementasi kurikulum inklusi, 3) evaluasi kurikulum, serta 4) implikasi dari kurikulum inklusi.

A. Desain Kurikulum Pendidikan Inklusi di SDI Al Azhaar Tulungagung dan SD Noble National Academy dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Peserta Didik.

Secara psikologis personal, dapat dicermati bahwa anak berkebutuhan khusus sesungguhnya memiliki kemampuan yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan di masa depan. Dengan catatan, penyusunan model pembelajaran dan pengembangan diri harus sesuai standar. Komposisi yang digunakan dalam model tersebut juga sebisa mungkin dibedakan. Penyikapan yang khusus itu lebih didasarkan pada karakter anak dalam kurikulum yang telah didesain.

Di SDI Al Azhaar, kurikulum yang digunakan pada dasarnya sama dengan kurikulum reguler yang diterapkan di sekolah umum, yakni menggunakan kurikulum 2013 atau K-13. Pengorganisasian kurikulum di SDI Al Azhaar ini berbasas pada kurikulum terpadu atau dalam istilah lainnya dengan azas tematik. Seperti yang telah diketahui bahwa azas tematik tidak menghendaki lagi adanya nama

mata pelajaran khusus. Cara pembelajaran lebih pada cara peserta didik mampu menyelesaikan suatu persoalan atau masalah.

Harapannya setelah peserta didik bisa belajar dari masalah-masalah yang ada, peserta didik tidak sekedar tinggi intelektualitasnya, tetapi juga memiliki emosional yang terarah dan terampil. Hal tersebut juga berlaku bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (ABK) di dalamnya. Kurikulum yang sama harus tetap diajarkan kepada ABK. Namun, dalam penerapannya, sedikit modifikasi dan penyederhanaan. Kurikulum didesain semaksimal mungkin untuk menghasilkan tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Kurikulum di SD Noble *National Academy* masih terpusat pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengembangan KTSP sendiri sampai saat ini menyesuaikan kepada konsep Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Dua kompetensi tersebut hadir dalam SI dan SKL. Pada ranah pengembangan KTSP, program pembelajaran individual (PPI) juga dijalankan.

Dalam pembelajarannya, kurikulum ini bisa fleksibel dan bisa dimodifikasi. Artinya bisa diimplementasikan menyesuaikan dengan tujuan lembaga. Seringkali disebut dengan istilah *subject centered curriculum*. Kurikulum ini memiliki muatan isi atau materi yang acak dan terpisah. Semua guru memiliki tanggung jawab penuh atas hal yang diajarkan, serta berfokus pada satu mata pelajaran.

Akan tetapi mengingat peserta didik yang ada di sekolah ini notabene sangat beragam dan terutama ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, maka hambatannya pun sangat beragam. Modifikasi sistem pembelajaran sangat dibutuhkan agar kondisi peserta didik yang dari segi latar belakang, keadaan ekonomi dan sosial yang berbeda, dapat mendapat ruang sama. Modifikasi yang dilakukan dalam kurikulum regular bisa menjadi bahan pertimbangan sekaligus menjadi indikator untuk melihat tingkat kemampuan individu dan bisa juga menjadi landasan pengembangan materi.

Modifikasi kurikulum dilakukan oleh kelompok kerja yang telah diatur pada lembaga, yakni mencakup waka bagian kurikulum, guru mata pelajaran, GPK, dan tambahan konselor khusus untuk inklusi. Tim kerja tersebut memiliki tugas utama merencanakan kurikulum dan memodifikasinya untuk kebutuhan ABK. Adapun hasilnya, akan

dikembangkan lebih lanjut oleh pendidik atau Guru Pendamping Khusus (GPK) melalui PPI.

Modifikasi kurikulum dari kedua sekolah di atas selaras dengan teori perkembangan kurikulum yang diungkapkan Hilda Taba bahwa yang dimaksud sebagai pengembangan kurikulum bukan sekadar memberi batasan, Akan tetapi, kurikulum dapat menjelaskan secara menyeluruh terkait konsep kurikulum dan dampaknya pada pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan sistem tersebut melibatkan berbagai macam aspek. Serangkaian aspek yang berbentuk keputusan itu diolah berdasarkan visi misi yang telah dipikirkan oleh lembaga secara spesifik. Sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik, maka muatan utama pembelajaran juga harus diseleksi kembali.¹

Terkait kurikulum dasar yang digunakan, hal ini terdapat dalam peraturan kementerian pendidikan bahwa pendidikan inklusi memakai standar kurikulum di tingkat nasional seperti yang ada di sekolah umum lainnya. Adanya penyesuaian atau modifikasi terhadap kurikulum standar tersebut, semata-mata untuk mempersempit jarak dan hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta didik.²

Kedua sekolah di atas sama-sama melakukan desain khusus kurikulum sesuai kemampuan anak. Tujuan dari kegiatan desain ini tidak lain adalah untuk merencanakan metode pengajaran, menentukan kelas, dan pilihan reguler atau inklusi. Pihak yang dilibatkan adalah guru pendamping, orang tua, psikolog dan pelaksanaan observasi.

Observasi ini dilakukan pihak sekolah dengan cara melakukan asesmen dan identifikasi kepada para peserta didik ABK. Tugas pihak sekolah adalah melakukan beberapa proses identifikasi khusus guna mengerti jenis kebutuhan siswa. Observasi bisa didapat dari orang tua untuk memperoleh informasi tentang biodata yang diperoleh dari awal masuk kelas inklusi. Dari pendidik, akan diperoleh informasi tentang tingkat kemampuan peserta didik di dalam kelas.

¹ Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice, ibid.*, hlm. 6.

² Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang *Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*, (Jakarta: Pembinaan PKLK Dikdas, 2011), hlm. 16.

Peran psikolog juga penting dalam mengetahui kondisi calon peserta didik. Pihak-pihak sekolah tentu saja tidak memiliki keahlian untuk mengetahui apakah jenis-jenis disabilitas yang disandang oleh anak-anak tersebut dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk penanganannya. Oleh karena itu, lembaga mengklasifikasikan dan menempatkan peserta didik ABK sesuai dengan hambatan yang dialami agar mudah diidentifikasi tingkat kebutuhannya.

Proses mendesain kurikulum diawali dengan memasukkan data-data anak, kemudian data tersebut akan dipelajari oleh guru untuk pembuatan materi pembelajaran. Informasi yang dibutuhkan untuk desain kurikulum selain informasi tentang kondisi anak juga keterampilan karena setiap GPK juga belum tentu bisa menanggapi anak tertentu. Desain kurikulum yang disetujui bersifat sederhana sekaligus kompleks dan juga fleksibel karena menyesuaikan kondisi anak.

Desain kurikulum juga dilakukan evaluasi. Di kedua sekolah di atas rutin dilaksanakan evaluasi. Evaluasi dimulai dengan cara melihat perkembangan anak. Jika hasil kurang memuaskan, desain kurikulum akan ditambah atau dikurangi. Namun, apabila tidak sesuai dengan kemampuan, maka desain kurikulum akan diganti. Maksudnya, bisa ditambah ataupun dikurangi oleh koordinator.

Selanjutnya, kelompok kerja yang telah dibentuk oleh lembaga dalam mengawal kurikulum untuk ABK, membuat (PPI). Muatan utama dari PPI tersebut adalah rencana pembelajaran yang dipersiapkan untuk peserta didik ABK. Jadi bisa dikatakan masing-masing peserta didik yang berkebutuhan khusus memiliki PPI sebagai acuan pembelajarannya. Dalam konteks penelitian ini, SDI Al Azhaar juga telah menerapkan PPI. Begitu juga di SD Noble, tetapi dengan istilah yang lain, yakni *Individual Education Program* (IEP).

Dalam pelaksanaannya, monitoring terus dilakukan. Apabila terdapat beberapa kendala, maka akan ada perbaikan kurikulum. Selain itu, ada persamaan antara kedua lokasi penelitian ini, yakni baik di Al Azhaar maupun di Noble, keduanya menggunakan jasa konsultan dan psikolog untuk secara khusus menangani kebutuhan ABK. Menurut Hamzah, orientasi yang dicapai dari pembelajaran

individu adalah adanya pengembangan diri pada masing-masing peserta didik ABK.³

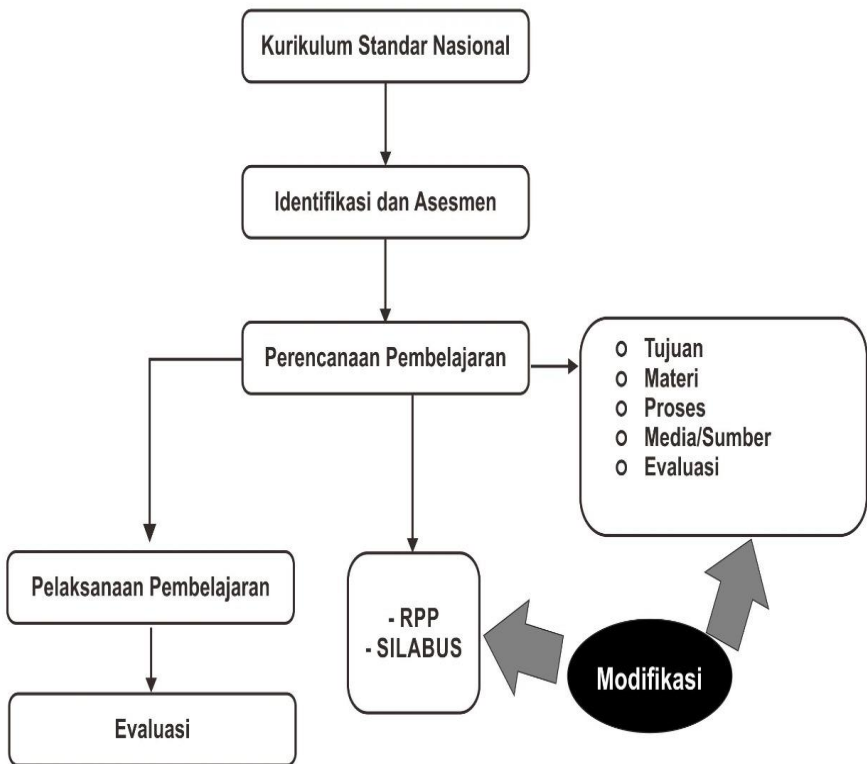
Kurikulum inklusi yang digunakan pada SDI Al Azhaar dan SD Noble juga diarahkan pada kemandirian ABK atau peserta didik secara umum, yaitu pada kecakapan hidup maupun *multiple intelegency*. Ini adalah salah satu perencanaan pembelajaran inklusi selain muatan akademik yang dinamakan bina diri. Tujuan perencanaan kurikulum ini adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak sehingga peserta didik nantinya mampu mendalami keahlian, kecakapan, serta potensi-potensi yang dimilikinya. Akhirnya, anak didik memiliki bekal ketika telah dewasa dalam melanjutkan kehidupan, sehingga mereka bisa mandiri dan tidak banyak bergantung pada orang lain.

Berdasarkan observasi peneliti, desain kurikulum yang dipakai sekolah berasal dari kurikulum reguler yang dimodifikasi sesuai kebutuhan peserta didik di kedua lembaga. Wali kelas dan guru pengampu mata pelajaran atau guru yang bertugas mendampingi ABK bekerja sama dan terlibat langsung dalam proses pembuatan kurikulum modifikasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *grass roots*, sebuah langkah penyusunan dari kelompok untuk kemudian diserahkan pada pimpinan lembaga. Desain kurikulum diambil sesuai dengan tujuan hasil analisis kebutuhan pembelajaran. Desain ini sendiri memiliki istilah khusus, yakni model *Dick and Carey*.⁴

Dari seluruh rangkaian program dan hasil kurikulum modifikasi yang peneliti saksikan di kedua lembaga penelitian tersebut, ada kesimpulan umum yang bisa peneliti tarik garis bawahnya. Kedua lembaga tersebut telah sesuai sebagaimana anjuran dan pedoman pemerintah. Berikut penulis berikan bagan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mekanismenya juga digunakan dalam kurikulum modifikasi.

³ Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 16.

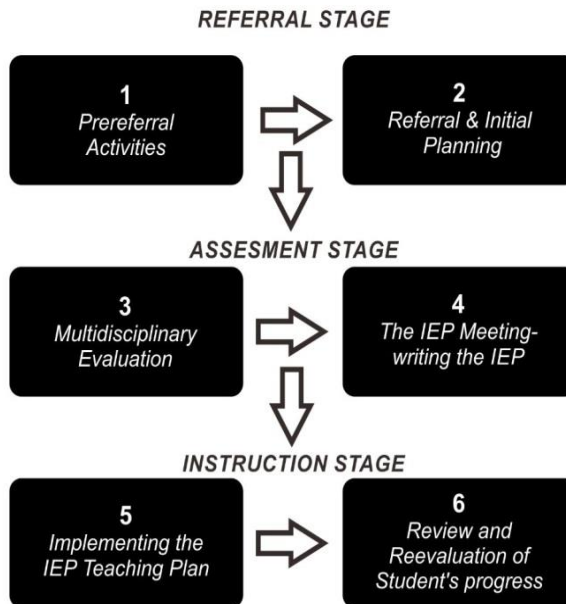
⁴ Oemar H Malik, *Manajemen...*, hlm. 150.



Gambar 5.1 Bagan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Inklusi 2013.⁵

⁵ Janet Lerner, and Johns, Beverley...hlm. 46.

Melihat bagan tersebut, kiranya peneliti bisa menyimpulkan bahwa program yang dilaksanakan di kedua lembaga, yakni SDI Al Azhaar dan di SD Noble *National Academy* selaras dengan pendapat Lerner dan Johns. Berikut bagan tahap penyusunan PPI sebagai landasan pelaksanaan kurikulum.



Gambar 5.2 Tahap penyusunan PPI.⁶

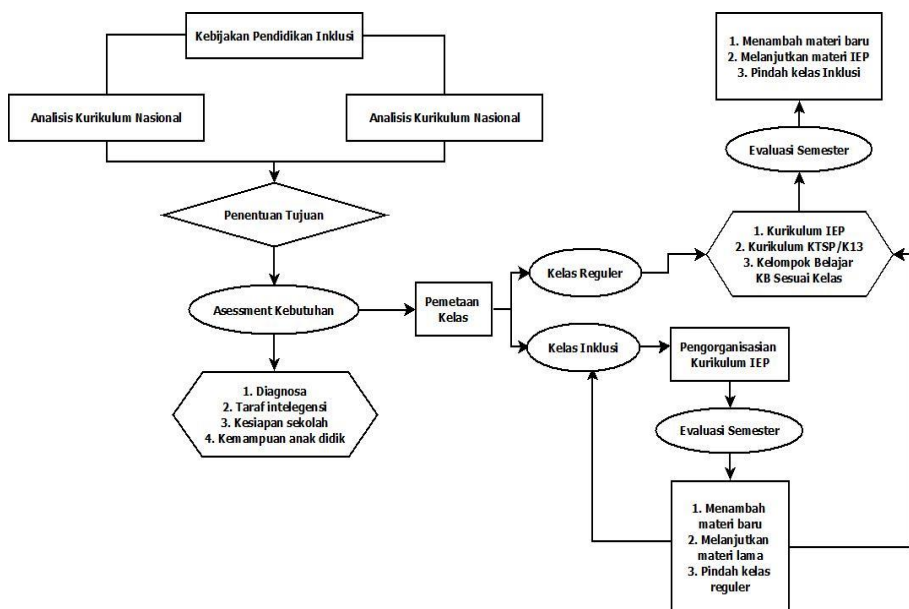
Dari enam tahapan yang ada di atas, keseluruhannya dapat dikategorikan dalam tiga tahapan perspektif Leaners dan Johns. *Pertama*, tahapan pengalihanganan atau *referreal stage*. Pada konteks dua lokasi yang peneliti ambil, di dalamnya ada persiapan, identifikasi kebutuhan peserta didik, sekolah membuat kurikulum modifikasi, dan sekolah juga membuatkan masing-masing peserta didik profil sebagai siswa di lembaganya.

Kedua, ada tahapan identifikasi lanjutan dari sekolah yang masuk dalam kategori *assesment stage*. Pada tahap asesmen sekolah dibantu oleh beberapa pihak, baik kelompok kerja yang dibentuk

⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

husus, maupun tim secara umum, untuk merampungkan RPP modifikasi dan juga persoalan PPI. *Ketiga*, proses pengajaran. Tahap ini juga disebut dengan *instruction stage*. Pembelajaran yang diproyeksikan dengan kurikulum modifikasi dilaksanakan dengan seksama di dalam ruang kelas yang dibuat inklusif.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa desain kurikulum kedua sekolah disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh dinas terkait dengan beberapa modifikasi agar sesuai kebutuhan ABK yang ada di sekolah tersebut. Desain dan pembelajaran yang digunakan di kedua sekolah adalah *grassroots approach*. Desain tersebut diawali dari *asessment*, perancangan pembelajaran individu (PPI) atau IEP menggunakan desain kurikulum humanistik, menggunakan pendekatan *integrated curriculum* (SDI Al Azhaar) dan *subject centered curriculum* (SD Noble National Academy), menghasilkan sebuah kurikulum humanistik modifikatif Integratif. Kedua sekolah tersebut sama-sama mengintegrasikan dua kurikulum nasional yang berbeda, dimodifikasi dengan memakai model Humanis sesuai keadaan peserta didik.



Gambar 5.3 Desain Kurikulum Humanistik Modifikatif Integratif

B. Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup di SDI Al Azhaar dan SD Noble National Academy

Implementasi dari kurikulum pendidikan yang diselenggarakan di kedua lokasi penelitian berbasis inklusi tersebut adalah bentuk adaptasi dari kurikulum pendidikan yang disediakan oleh dinas pendidikan yang diubah dan dimodifikasi sedemikian rupa agar sesuai kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang diselenggarakan oleh lembaga SDI Al Azhaar seperti dijelaskan sebelumnya adalah K-13 tematik yang oleh guru pendamping khusus dikerucutkan kembali dan disesuaikan dengan indikator ABK. Penekannya lebih pada pengembangan *life skill* atau kecakapan dalam menjalankan roda kehidupan. Tujuannya, peserta didik bisa seimbang kompetensinya, baik yang berkaitan dengan keterampilan, sikap maupun dari segi pengetahuan.⁷

Kurikulum ini diorientasikan untuk bisa meningkatkan kemampuan peserta didik dan mengembangkan potensi dan keterampilan. Kurikulum 2013 yang berbasis tematik ini sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya karena dalam proses pembelajarannya memberi ruang kepada peserta didik untuk bisa berpikir kritis, berkegiatan secara aktif, dan meningkatkan daya kreativitasnya tanpa diskriminasi.⁸

Implementasi kurikulum di SD Noble, masih menggunakan KTSP yang penerapannya berdasarkan operasional yang sebelumnya memang sudah dirumuskan dan diselenggarakan di masing-masing unit pendidikan.⁹ Di dalam kurikulum yang tergabung di KTSP, ada beberapa aspek yang masuk ke dalamnya, seperti tujuan dari pendidikan di masing-masing unit lembaga, ada kalender akademik, struktur, dan muatan kurikulum, serta menggunakan silabus.¹⁰ Keberadaan KTSP sendiri memiliki tujuan membuat lembaga penyelenggara pendidikan mandiri. Sekolah yang

⁷ M. Fadlilah, *Implementasi Kurikulum 2013: Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, & SMA/MA*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 16.

⁸ Yunus Abidin, *Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 117.

⁹ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hlm. 138.

¹⁰ Fatah Syukur, *Methodik Khusus Pendidikan Agama Islam*, (Semarang: FAI Unwahas dan PMDC, 2011), hlm. 51.

menggunakan kurikulum dalam KTSP akan sanggup memberdayakan peserta didik melalui peningkatan kompetensi yang bersesuaian dengan keadaan lingkungan.¹¹

Berlandaskan hal di atas, pembelajaran seperti pada SD Noble menerapkan pembelajaran *multiple intelegences*. Pembelajaran dengan basis *multiple intelegences* ini berfungsi menemukan bakat dan potensi peserta didik, termasuk ABK. Pembelajaran ini terdiri dari beberapa aspek penting, seperti kemampuan berbahasa atau *verbal-linguistik*, berkesenian, mampu berpikir logis-matematis, kinestetik-jasmani, maupun kecerdasan *science*.¹²

Desain kurikulum yang dipilih kedua sekolah ini ialah desain kurikulum integratif. Desain ini mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum lembaga yang sesuai dengan kemampuan awal siswa.

Dengan demikian sebelum memutuskan desain kurikulum, kedua lembaga pendidikan yang menjadi objek penelitian sudah lebih dulu melakukan identifikasi terkait kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi desain tersebut melalui tahap penyesuaian pembelajaran dengan yang diperlukan ABK. Kemampuan awal peserta didik penting diketahui dan dianalisis sebelum desainer sampai pada rumusan *performance goals* atau tujuan khusus dari kurikulum.¹³

SDI Al Azhaar maupun SD Noble melaksanakan monitoring, perbaikan kurikulum, dan pembelajaran selanjutnya. SDI Al Azhaar maupun SD Noble mengimplementasikan kurikulum dengan memberikan penunjang berupa PPI atau IEP. Program pembelajaran tersebut berguna bagi ABK karena sistem pembelajarannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dalam mengimplementasikan kurikulum yang telah di susun pada dasarnya pendidik memberikan perlakuan yang sama kepada masing-masing peserta didik, tetapi pada akhirnya jika kemampuan daya tangkap peserta didik tidak sama otomatis pendidik juga memberikan perlakuan khusus pada siswa tersebut.

¹¹ Muhammad Joko Susilo, *KTSP Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 12-13.

¹² Eric Jensen, *Brain Based...* hlm. 33.

¹³ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 59.

Pada saat pembelajaran berlangsung, implementasi kurikulum pada kedua sekolah sama-sama menggunakan sistem *pull out*. Pada jam tertentu siswa melakukan pembelajaran di ruang terapi atau ruang khusus untuk menerima materi oleh *shadow teacher*. Meski demikian, sebelumnya siswa ABK telah sama-sama menerima pembelajaran yang sama dengan siswa lainnya di kelas reguler dengan didampingi *shadow teacher* yang berfungsi sebagai pendamping dan pengarah anak didik berkebutuhan khusus.

Model manajemen yang dimiliki oleh dua lembaga pendidikan inklusi yang penulis teliti memiliki kesamaan. Letak persamaannya terdapat pada layanan pembelajaran setara yang didapatkan oleh ABK, yakni di kelas khusus. Di sini peserta didik mendapatkan pembelajaran berupa keterampilan diri dan materi akademik. Peserta didik bisa mendapatkan pembelajaran sebagaimana kelas reguler sesuai dengan bakat dan kebutuhannya.¹⁴

Menurut Satmoko, pelayanan khusus sangat dibutuhkan oleh ABK mengingat hambatan dan kesulitan yang mereka sandang masing-masing berbeda. Jadi, tidak salah jika kemudian yang diterapkan adalah pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan ABK dan lazimnya memang disesuaikan dengan gangguan yang lazim dialami.¹⁵ Seperti halnya ketika mendapatkan anak autis yang pada umumnya hidup dengan duunianya sendiri, guru pendamping lazimnya memahami upaya pembelajaran yang memudahkan mereka dalam memahami materi dari guru kelas. Dalam implementasi kurikulum, guru pendamping harus memahami semisal anak penyandang autis memiliki problem dalam hal menjalin interaksi dengan sesama, kesulitan berkomunikasi, emosional maupun memiliki gangguan sensoris. Dengan demikian, telah memiliki kurikulum pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kondisi anak didiknya.

Sebelumnya, persoalan kebijakan yang ditetapkan di dalam sekolah, yang berhubungan dengan pengajar, kurikulum, sampai pada lingkungan belajar, adalah persoalan utama yang membutuhkan solusi. Untuk persoalan kurikulum yang berbasis

¹⁴ Ina Agustin, "Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Sumber Sari 1 Kota Malang", dalam *Jurnal Education and Human Development Journal*, Vol.01 No.01, September 2016, hlm. 29-30.

¹⁵ Satmoko Budi, *Sekolah Alternatif, Mengapa Tidak?*, (Jogjakarta: Diva Press, 2010), hlm. 128

inklusi, dipastikan bisa bersifat sangat fleksibel. Hal ini karena dipengaruhi adanya ABK yang masing-masing memiliki kemampuan dan hambatan yang berbeda. Kurikulum dibuat dinamis dan adaptif. Kemudian persoalan tenaga pendidik, guru-guru yang khusus mengampu pembelajaran ABK dipastikan sudah memahami instruksi-instruksi yang digunakan dalam penyelenggaraan kurikulum.

Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika guru melaksanakan pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai perkembangan pada anak didik. Menurut Hilda Taba, seleksi terhadap mata pelajaran harus dilakukan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai. Penyeleksian tidak sekadar atas karakter-karakter yang sifatnya umum, tetapi juga memperhatikan ABK dan kompleksitas karakter khususnya. Agar bisa dikatakan adil, penerapan kurikulum memerlukan modifikasi dan penyesuaian, jika disamaratakan justru memberikan kesan tidak adil, mengingat kebutuhan ABK yang berbeda.¹⁶

Penyelenggaraan pembelajaran bisa dikatakan adil ketika setiap anak sebagai peserta didik mendapatkan haknya dalam pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Pendidikan tidak sekadar datang ke sekolah, tetapi belajar mengenai banyak aspek dalam kehidupan. Apalagi dalam program berbasis inklusi, partisipasi dan kompetensi anak selalu berupaya dikembangkan.

Hadirnya pendidikan berbasis inklusi diharapkan mampu memberi acuan pada sekolah-sekolah regular agar bisa memberikan kesempatan yang sama pada ABK sebagaimana anak-anak pada umumnya. Hal ini juga didukung oleh keputusan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan soal layanan lembaga guna penuntasan wajib belajar bagi ABK. Keputusan No. 002/U/1986 memang dirintis untuk pengembangan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi sendiri dianggap ideal karena bisa mewadahi keperluan peserta didik secara keseluruhan, tidak terkecuali ABK.

Ada empat karakteristik yang membuat pendidikan inklusi menjadi wadah yang paling ideal untuk diselenggarakan. *Pertama*, keragaman karakter anak dapat direspon oleh sistem pendidikan inklusi karena sifatnya yang dinamis dan adaptif. *Kedua*, kesulitan

¹⁶ Jack R. Fraenkel. *The Evolution of the Taba Curriculum Development Project...* hlm. 151-152.

dan hambatan-hambatan yang dialami oleh anak bisa dipecahkan dan diatasi melalui pendidikan inklusi. *Ketiga*, semua anak, baik normal maupun ABK mendapat kesempatan pembelajaran yang adil, peserta didik juga bisa ikut aktif berpartisipasi dan meningkatkan potensi. *Keempat*, ABK dan anak-anak yang dulunya termarginalkan dan mendapat diskriminasi karena dianggap berbeda, melalui pendidikan inklusi bisa mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.¹⁷

C. Evaluasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di SDI Al Azhaar dan SD Noble National Academy dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Peserta Didik

Evaluasi merupakan salah satu proses yang sistematis untuk menilai dan memperbaiki kinerja kurikulum dan metode-metode pembelajaran selama diselenggarakan. Dengan adanya evaluasi, lembaga bisa mengetahui sesuai tidaknya penyelenggaraan kurikulum dengan tujuan pendidikan di lembaga tersebut.¹⁸

Dalam pelaksanaannya, evaluasi kurikulum pendidikan inklusi melibatkan semua aspek dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada peserta didik. Di sini, ABK pun mendapatkan kesempatan seperti melaksanakan ujian semester, ujian akhir, dan lain sebagainya, dengan standar dan indikator yang ditetapkan secara berkeadilan. Semisal SD Noble *National Academy*, lembaga memberlakukan tes dan ujian dalam waktu dan cara yang sama antara peserta didik umum dengan ABK. Namun, untuk penilaian, dibedakan sesuai kemampuan ABK. Perihal penilaian untuk ABK, biasanya dilakukan dengan memberi gambaran berupa kalimat-kalimat berisi hasil pembelajaran dan perilaku ABK masing-masing dan bukan dalam bentuk angka.

Demikian juga dengan SDI Al Azhaar. Standar penilaian yang digunakan di sekolah ini juga menggunakan indikator yang sebagaimana diterapkan di sekolah-sekolah reguler lainnya. Namun untuk masalah penilaian, sedikit dibedakan, mengingat ABK

¹⁷ Kemendiknas. 2007. *Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. hlm. 4.

¹⁸ Oemar H malik, *Dasar-dasar...* hlm. 253.

memiliki hambatan. Bentuk penilaian dibuat deskriptif dan *grade* untuk ABK menjadi lebih rendah dan tidak menggunakan angka sebagaimana nilai pada umumnya.

Bentuk penilaian untuk ABK yang dibuat berbeda, bukanlah tanpa sebab dan pertimbangan. Penilaian numerik yang diberikan pada anak secara umum tidak bisa mewakili peserta didik difabel atau berkebutuhan khusus karena tingkat hambatan dan kesulitan yang dialami lebih kompleks. Kondisi yang berbeda dengan anak-anak yang normal harus pula dihargai dengan bentuk penilaian yang khusus dengan tetap memperhatikan asas keadilan. Narasi dan deskriptif dipilih karena aspek-aspek tersebut bisa mewakili kebutuhan dan kemampuan ABK.

Dalam konteks evaluasi yang dilakukan di SDI Al Azhaar, lembaga membuat jadwal rutin setiap akhir pekan untuk para guru dan tim internal yang bertugas dalam pembelajaran inklusi. Pertemuan tersebut diisi dengan pembinaan bagi para pengajar sekaligus mendiskusikan kendala-kendala yang dialami selama sepekan dalam penyelenggaraan kurikulum inklusi. Para guru juga diberi ruang untuk menyampaikan masukan dan solusi terkait kendala yang ada. GPK juga mengevaluasi kinerja dengan sesamanya. Hal ini dilakukan agar di minggu berikutnya, kendala yang dihadapi saat ini sudah bisa teratasi sehingga pembelajaran kepada ABK bisa berjalan optimal.

Begitu halnya dengan lembaga kedua, yakni SD Noble. Dalam kurun satu bulan sekali, jajaran internal sekolah ini melakukan evaluasi bersama. Dalam proses tersebut pembahasan yang utama adalah mengenai hasil penyelenggaraan kurikulum inklusi. Selain itu, khusus untuk tim *Noble Care* akan melakukan evaluasi lebih sering, yakni setiap satu minggu sekali. Jika terdapat masalah krusial yang menuntut segera dibahas dan dicarikan jalan keluar, maka tim khusus akan meminta waktu untuk membahas dan meminta persetujuan dari pimpinan lembaga atau kepala sekolah.

Hal ini selaras dengan Taylor, setidaknya dalam suatu lembaga pendidikan evaluasi dilaksanakan minimal dua kali agar bisa mengetahui ada tidaknya perubahan orientasi dan kendala dalam pelaksanaan. Biasanya waktu minimum tersebut dilaksanakan pada awal dan akhir perbaikan. Meskipun ada batas minimum, Taba juga menjelaskan bahwa proses evaluasi mesti terus dilakukan selama program perbaikan kurikulum berjalan, bisa sepekan sekali, dua

pekan sekali dan lain sebagainya. Makin sering evaluasi dilakukan, tentu proses penyelenggaraan kurikulum juga jadi lebih baik.¹⁹

Sementara menurut Hilda Taba, strategi umum dalam implementasi kurikulum adalah adanya sebuah pengukuran kecil, pelaksanaan uji coba sebagian, diikuti oleh revisi, diikuti oleh uji coba seluruh kesatuan, revisi lagi, hingga akhirnya dapat melepaskan kurikulum yang telah dibuat sedemikian rupa untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan secara umum.²⁰ Harus ada sinergi dari GPK, mengingat selama ini yang paling memahami keadaan ABK adalah pengajar khususnya.

Lebih lanjut, jika dalam kurun waktu tertentu, peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak berkembang kemampuannya secara akademik maupun sikap dan keterampilan, maka evaluasi menjadi barang penting yang harus diprioritaskan dan segera dilakukan. Kesenambungan dalam proses evaluasi adalah kunci menjalankan kurikulum dengan semakin baik. Selain itu, mengingat ABK memiliki banyak perbedaan dengan siswa normal, maka fleksibilitas sangat dibutuhkan di samping menjalankan hasil-hasil evaluasi secara terus menerus.

D. Implikasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di SDI Al Azhaar dan SD Noble *National Academy* dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Peserta Didik.

Menurut Silalahi, implikasi merupakan akibat yang dihasilkan dari adanya penerapan sebuah kebijakan atau program tertentu. Sifatnya bisa baik maupun buruk bergantung jenis program, pelaksanaan dan sasaran dari program maupun kebijakan tersebut.²¹ Sebagaimana temuan yang peneliti peroleh di SDI Al Azhaar, dalam menentukan standar implikasi yang bagus pada peserta didik, harus dapat dibuktikan melalui perubahan-perubahan yang terjadi pascapembelajaran. Hal ini mungkin tidak mudah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, perlu diketahui bahwa peserta didik adalah anak-anak yang unik.

¹⁹ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar...* hlm. 255.

²⁰ Jack R. Fraenkel. *The Evolution of the Taba Curriculum Development Project...* hlm. 151.

²¹ Amin Silalahi, *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*, (Surabaya: Batavia Press, 2005), hlm.43

Tidak semua pembelajaran di kelas dapat mereka tangkap seperti peserta didik *regular*. Setidaknya, pengajaran kecakapan hidup itu menjadi hal yang utama dalam pembelajaran. Sehingga anak-anak memiliki bekal kecakapan hidup untuk masa depan. Biasanya, anak-anak di sini memiliki bermacam-macam bakat dan kesenangan yang tidak dapat diketahui dengan hanya terlibat aktif dalam pembelajaran materi-materi umum di kelas. Kecakapan hidup ini diperlukan sebagai bekal sekaligus sarana pengasah bakat dan minat anak-anak di bidang yang mereka kuasai.

Untuk mencapai keberhasilan kurikulum, standar pencapaian keberhasilan itu dapat diketahui ketika keberhasilan individu dapat dicapai melalui tingkat penguasaan kecakapan hidup masing-masing anak. Artinya, tidak ada standar yang ditetapkan dalam pencapaian keberhasilan kurikulum, hanya standar individu yang ditetapkan oleh sekolah. Standar penilaian kinerja guru dapat diukur melalui kedisiplinan, tugas-tugas kewajiban yang harus diselesaikan, dan kehadiran.

Adanya kecakapan hidup sesungguhnya merupakan kunci pengendalian standar implikasi yang ideal. Banyak sekolah yang tidak mengerti standar implikasi yang bagus dalam dunia pendidikan. Utamanya, yaitu pada sekolah yang menerima peserta didik yang menyandang kebutuhan khusus untuk menghasilkan capaian yang berstandar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hal ini juga tidak berbeda dengan SD Nobel pada tataran hasilnya, SD Noble juga sama-sama menekankan pada kecakapan hidup. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kurikulum ini membawa implikasi positif bagi peserta didik. Penekanan kecakapan hidup ini juga bisa membawa kemaslahatan pada anak-anak penyandang disabilitas atau ABK sesuai lulus dari sekolah. Meski demikian, penting memperhatikan desain kurikulum yang melihat peserta didik bukan hanya dari kebutuhan, tetapi juga dari potensi yang cenderung dapat dikembangkan. Pembelajaran yang dilaksanakan tidak hanya fokus pada materi yang diajarkan pada kelas reguler sama seperti anak-anak normal lainnya. Namun juga difokuskan pada *skill* anak didik yang dilihat penting untuk dikembangkan.

Dalam konteks pendidikan, manusia tidak bisa dilepaskan dari kompetensi atau kemampuan dasar yang dimilikinya, baik berupa bakat dan minat keterampilan. Namun demikian selalu ada

kekurangan dan kelebihan dari masing-masing manusia. Begitu juga yang terjadi pada anak-anak yang masuk dalam kategori difabel (*people with different ability*) yang secara fisik maupun psikis memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini sudah dipahami sebagai kelainan dalam proses pertumbuhan anak sehingga anak-anak dengan keistimewaan dan kebutuhan khusus ini harus juga mendapatkan bentuk pembelajaran dan pelayanan yang khusus.

Sebagai wadah bagi ABK, pendidikan inklusi yang dibahas dalam penelitian ini masih tergolong pengetahuan baru di Indonesia. Jadi, tidak jarang anak-anak sejatinya memiliki kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan yang tinggi untuk dapat dipergunakan modal kehidupannya kelak setelah lulus dari sekolah. Oleh sebab itu, fungsi sekolah inklusi adalah sebagai wadah pengembang keterampilan hidup anak didik yang tidak pernah ia dapatkan di luar.

Menurut Stainback dalam "*Modul Pelatihan Pendidikan Inklusi*" lembaga yang berbasis inklusi memang tersedia untuk memberi ruang yang sama bagi peserta didik. Program pendidikan inklusi yang diterapkan oleh sekolah-sekolah berani memberikan pelayanan pembelajaran yang layak dan sesuai dengan kebutuhan anak. Tidak ada pembedaan antara anak-anak yang normal dengan mereka yang merupakan ABK. Semua mendapatkan jatah dan posisi yang sama dan setara, termasuk dalam partisipasi di kelas, kerja sama antara guru dengan peserta didik dan berteman dengan siapa saja, termasuk mendapatkan hak untuk bisa diterima di masyarakat.²²

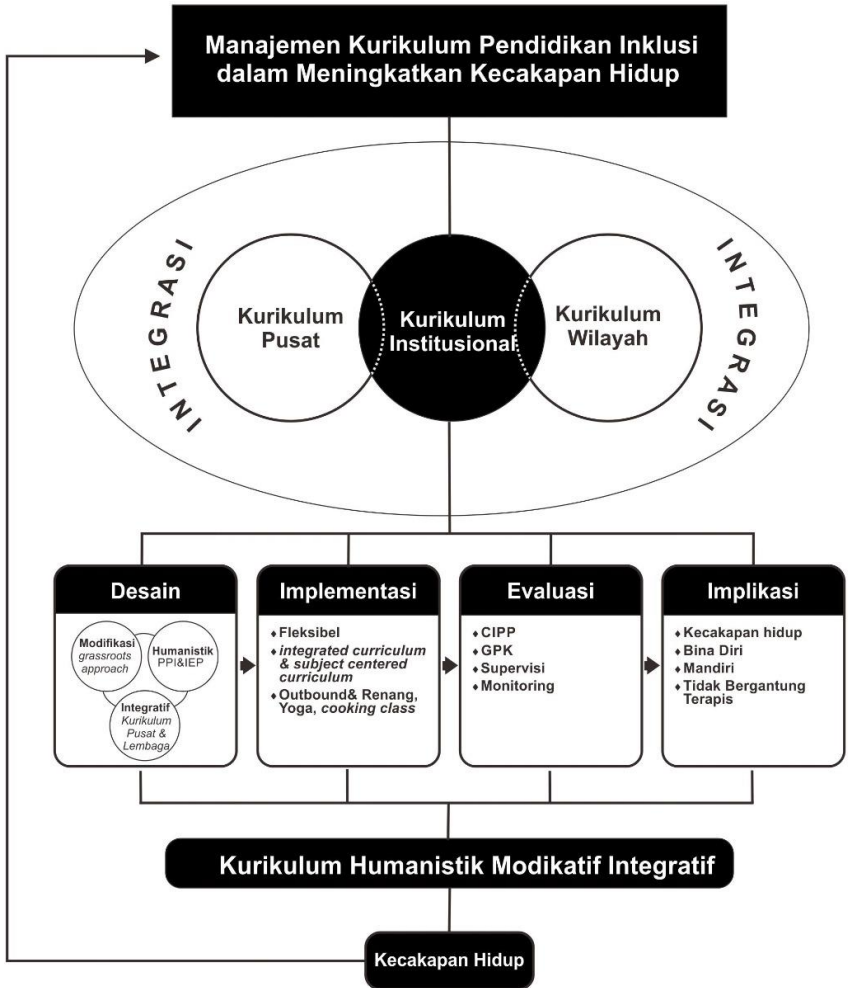
Dalam proses implementasi kurikulum, perlu adanya modifikasi dan penyesuaian kurikulum agar tidak terjadi masalah ketika peserta didik yang normal berada dalam satu kelas dengan ABK. Tentunya ini menuntut kerja sama dari banyak pihak, termasuk kepala sekolah sampai GPK. Jika tidak dimodifikasi, maka kesulitan-kesulitan akan membayangi selama penyelenggaraan pendidikan inklusi di dalam kelas tersebut karena ketidaksiapan kurikulum menjadi fleksibel.

²² Stainback, W & Stainback, *Support Network for Inclusive Schooling Independent Integrated Education*. (Baltimore: Paul H Brookes,1995), hlm. 44.

Ketiadaan proses modifikasi dalam kurikulum akan mengakibatkan banyak kerugian. Salah satunya terkait dengan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar kepada ABK, tidak akan optimal. Selain itu jika tidak ada kesesuaian, peserta didik yang tergabung di kelas ABK akan kesulitan meresapi proses pembelajaran. Hal ini menandakan bahwa adaptasi dan modifikasi kurikulum sangat diperlukan dalam rangka menyesuaikan kebutuhan guru dan peserta didik. Bahan-bahan atau materi yang sudah dipersiapkan dalam kurikulum harus dilakukan modifikasi agar bisa digunakan untuk ABK. Jadi bukan ABK yang harus mengejar ketertinggalan dan kecerdasan anak lain, tetapi kurikulum inklusi yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi ABK.

Dampak adanya modifikasi kurikulum inklusi sekolah mampu melibatkan beberapa, ruang lingkup, kontinuitas, keseimbangan bahan pelajaran dan alokasi waktu. Ruang lingkup materi yang disajikan, materinya diambil dari kehidupan bermasyarakat. Anak didik berkebutuhan khusus mendapatkan ruang untuk mengembangkan keterampilan, peserta didik saling menghormati antarpeserta didik lain yang memiliki kebutuhan khusus, tidak melakukan perbuatan tercela, memberikan apresiasi dan bergaul selayaknya dengan peserta didik normal lainnya.

Dari pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya sebuah implikasi akan muncul setelah atau paling tidak setelah kurikulum diterapkan atau berlangsung. Akan tetapi karena pada dasarnya kurikulum itu akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sudah sesuai kondisi peserta didik, maka besar kemungkinan bahwa kurikulum tersebut akan memberi implikasi terhadap peningkatan peserta didik. Berikut ini merupakan skema manajemen kurikulum inklusi.



Gambar 5.4. Skema Manajemen Kurikulum Inklusi